

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah Syukur, 1987. *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*, Ujung Pandang : Persadi.

Akdon, 2016. *“Strategic Management For Educational Management”* Bandung: Alfabeta.

Amirullah, Widayat. 2002. *Metode Penelitian Pemasaran*. Malang: CV. Cahaya Press.

Bintoro Tjokromidjojo, 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T.Gunung Agung.

Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*, Jakarta: PT. Buku Kita.

Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1987. *“Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”*, (terjemahan oleh Masri Maris).Jakarta : UI-Press.

Dermawan Wibisono, Ph.D,2006, *Manajemen Kinerja*, Jakarta : Erlangga.

Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University.

Edward III, George C. 1984. *Public Policy Implementing*. London: Jai Press Inc.

- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S, 2012, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat. Salemba Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Irfan Islamy, 1999. *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Modul 1-9 UT, Jakarta.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP. Press.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Nugroho Dwijowijoto, 2003. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Solichin Abdul Wahab, 1987. “*Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*”, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sedarmayanti, 2012, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik “* Bagian Pertama, Edisi Revisi. Bandung : Mandar Maju.
- Widodo, 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

B. JURNAL

Fitriani, L. & Solikhin, A.(2025).“*Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Dimoderasi oleh Teknologi Informasi*”. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, Vol. 13 No. 05 hlm. 1548–1561.

Yuliani N. L. (2014) “*Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*”. Jurnal Manajemen Bisnis, 5 (2), 128-157.

Fuad, K. & Baharani, R. Y. (2021) “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kepercayaan Publik pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang*”. E-Jurnal Akuntansi, Vol. 31, No. 4, hlm. 98-995.

Paskalis Kurniawan Suri, Yohana F. Angi, & Cicilia A. Tungga. (2024). “*Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu*”. Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif, Vol. 2 No. 2, hlm. 59-66.

Safitri, D. U. R., & Widarjono, A. (2023) “*Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota di Kalimantan*”. Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2 No. 2.

Sartika, D., Deby Clara Monita, & Andre Ilyas (2020) “*Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah: Studi Kasus BPKAD Kota Padang*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, Vol. 22 No. 2, hal. 195-209.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2026.

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 s/d Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Bupati Indramayu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 s/d Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Bupati Indramayu Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 s/d
Tahun Anggaran 2024.

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran
2022 s/d Tahun Anggaran 2024.

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Prioritas Plafond Anggaran
Sementara (PPAS) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 s/d
Tahun Anggaran 2024.